

Pengaruh Kemampuan Aparatur, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, dan Peran Pengawas Internal Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Variabel Intervening

Dimas Pratama Putra

Universitas Tridinanti

Dimaspratama190491@gmail.com

Abstract: *This study was conducted on the local work unit (read: SKPD) in Palembang. The objective of this study is to determine the effect of apparatus' capability and the use of regional financial accounting information system, and the role of internal control on the financial accountability with the quality of financial reports as a mediator variable. Population in this study is the local work unit in Palembang. The sample is taken using purposive sampling with the specified criteria of 40 respondents. This study conducted through path analysis by using SPSS 20. For testing the mediator variable, the reseacher used causal strategy. The results show that: (1) apparatus' capability does not have any effects on the quality of financial reports, (2) the use of regional financial accounting information system is positive and significant effect on the quality of financial reports, (3) the role of internal control does not have any effects on the quality of financial reports, (4) apparatus' capability is positive and significantly effect the financial accountability, (5) the use of regional financial accounting information system has positive and significant effect on the financial accountability, (6) the role of internal control is positive and significantly effect the financial accountability, (7) the quality of financial reports has positive and significant effect on the financial accountability, (8) the quality of the finacial reports mediate the apparatus' capability towards the financial accountability, (9) the quality of financial reports mediate the use of regional financial accounting information system towards financial accountability, (10) the quality of financial reports mediate the role of internal control towards financial accountability.*

Keywords: *apparatus' capability, the use of regional financial accounting information system, the role of internal control, quality of financial reports, financial accountability.*

Abstrak: Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen kemampuan aparatur, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan peran pengawas internal terhadap variabel dependen akuntabilitas keuangan dengan kualitas laporan keuangan sebagai variabel mediator. Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sampel yang ditentukan dengan metode purposive sampling dengan kriteria yang ditentukan adalah 40 responden. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis jalur dengan menggunakan SPSS 20. Tes variabel mediator dilakukan dengan strategi kausal. Hasil penelitian menunjukkan (1) Kemampuan aparatur tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, (2) Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan, (3) Peran pengawas internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, (4) Kemampuan aparatur berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan, (5) Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan, (6) Peran pengawas internal berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan, (7) Kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan, (8) Kualitas laporan keuangan memediator antara kemampuan aparatur terhadap akuntabilitas keuangan, (9) Kualitas laporan keuangan memediator antara pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan, (10) Kualitas laporan keuangan memediator peran pengawas internal terhadap akuntabilitas keuangan.

Kata kunci: kemampuan aparatur, pemanfaatan SIKD, peran pengawas internal, kualitas laporan keuangan, akuntabilitas keuangan.

1. PENDAHULUAN

Kebutuhan atas pengelolaan keuangan daerah yang baik menjadi sangat penting di era desentralisasi saat ini. Di sini peran pemerintah daerah perlu didorong untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* berupa transparansi dan akuntabilitas publik. Misi utama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan dan pelayanan publik. Reformasi yang terjadi di Indonesia tidak hanya mengubah kehidupan politik di Indonesia, tetapi tatanan pemerintah pun menjadi berubah seiring besarnya keinginan masyarakat untuk mengatur pemerintahan daerahnya secara otonom, selain itu keinginan masyarakat juga didorong untuk menciptakan *good governance* yang terbebas dari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme yang sudah menjadi suatu budaya bangsa Indonesia

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 adalah Undang-Undang yang berupaya mewujudkan otonomi daerah yang lebih luas. Pelaksanaan otonomi daerah yang lebih luas berarti memberikan kebebasan yang sangat luas untuk mengatur segala segi pemerintahan daerah, baik pengelolaan keuangan, sumber daya yang ada bahkan pemanfaatan potensi daerah itu sendiri. Namun dibalik kebebasan itu harus ada suatu pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada masyarakat, sehingga timbul transparansi dan akuntabilitas. Untuk hal tersebut maka dibutuhkan kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan terutama mengenai keadaan keuangan. Khusus untuk melaksanakan kontrol tersebut, masyarakat membutuhkan informasi akuntansi yang berkualitas. Informasi akuntansi yang berkualitas tersebut tersirat kepada laporan keuangan yang berkualitas. Selain itu laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah juga harus memenuhi standar yang baku serta harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Standar yang baku tersebut adalah Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan produk hukum dari Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010. Disamping Peraturan Pemerintah, disusul dengan peraturan yang lebih teknis yaitu dengan dikeluarkannya Permendagri Nomor 21 Tahun 2012 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan daerah.

Suwardjono (2005) menyatakan bahwa tujuan utama dalam pelaporan keuangan organisasi non bisnis seperti unit-unit pemerintahan yaitu untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia dana dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam membuat keputusan-keputusan rasional tentang alokasi dana keorganisasian tersebut. Pemerintah sudah seharusnya meningkatkan kualitas laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang dibutuhkan berbagai pihak. Peningkatan kualitas laporan keuangan di maksudkan agar dapat meningkatkan kredibilitasnya, menyajikan informasi yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan pemakai, dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

Roviyantie (2011) menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas yang memenuhi karakteristik kualitatif diperlukan aparatur pengelolaan keuangan yang mempunyai kemampuan dalam bidang akuntansi.

Widodo (2001:308), menyatakan bahwa kemampuan didapat dengan berbagai macam cara antara lain sebagai berikut; (1) Melalui Pendidikan, (2) Melalui Pelatihan, (3) Melalui Pengalaman. Dari deskripsi teori kemampuan aparatur yang telah diuraikan di atas, diperoleh suatu konsep pemahaman bahwa kemampuan aparatur adalah suatu kondisi

dinamis sumber daya manusia yang mencakup aspek Pendidikan, Pelatihan, dan Pengalaman.

Selain kemampuan, pemanfaatan teknologi informasi juga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, penggunaan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, untuk membantu pengelolaan data yang lebih cepat efektif dan efisien. Karakteristik yang menonjol dari kerangka sistem informasi diantaranya dimensi sumber daya manusia, meliputi: data, pelaksanaan atau personalia, perlengkapan, peralatan, dan dana; dimensi tugas, meliputi: pengumpulan data, pemrosesan data, manajemen data, pengendalian data, pengadaan informasi; dimensi tujuan, meliputi: dukungan terhadap pengambilan keputusan, dukungan terhadap operasi harian, dukungan terhadap kewajiban kepengurusan; dimensi pemakai informasi, meliputi: manajer, pegawai, pemilik, dan pemakai eksternal lainnya; dimensi tahapan, meliputi: masukan, pemrosesan, keluaran. (Nunuy 2009).

Saat ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah memanfaatkan teknologi informasi yang menghasilkan suatu sistem informasi, dimana menyediakan informasi mengenai keuangan daerah yang dapat diakses. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, serta mengelolah data keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dapat mempercepat proses kerja dalam mengelolah keuangan daerah dan menyediakan informasi keuangan daerah yang komprehensif kepada masyarakat luas.

Selain itu peran pengawas internal berperan penting dalam peningkatan kualitas laporan keuangan. Menurut Yuliani (2010) menyatakan bahwa internal audit adalah suatu aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang

dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Dengan demikian pengawas internal membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan resiko kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi. Dengan adanya peran internal audit/inspektorat selaku aparat pengawas internal diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengarahkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah memiliki karakteristik kualitatif laporan keuangan yang relevan, handal, dapat dipahami, dan dapat diperbandingkan.

Salah satu cara bagaimana melihat apakah laporan keuangan yang telah disusun telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan telah sesuai dengan kualitas yang diharapkan, dapat dilihat dari opini auditor eksternal Pemerintah. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Selatan. Pada tahun 2015 Kota Palembang telah memperoleh penghargaan 'Wajar Tanpa Pengecualian' (WTP) untuk penyajian dan pelaporan keuangan pemerintah. Penghargaan tersebut diperoleh kota Palembang berturut-turut sejak tahun 2010. Walaupun demikian, berdasarkan hasil evaluasi BPKP perwakilan Sumatera Selatan, dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang temuan-temuan yang berkaitan dengan pengaruh kemampuan aparatur, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan peran pengawas internal terhadap akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut:

- (1) Kesiapan Pemerintah Provinsi Sumsel dalam rangka penerapan sistem akuntansi berbasis akrual belum memadai. Penjelasan: Belum tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan memadai setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terutama dalam hal pengelolaan keuangan berdasarkan data yang diperoleh dari badan kepegawaian daerah provinsi Sumsel yang memiliki latar belakang Sarjana Ekonomi sebanyak 504 orang, yang terdiri dari 126 orang

Sarjana Akuntansi dan sebanyak 378 orang Sarjana Ekonomi Non Akuntansi,

- (2) Pengendalian dan pengelolaan teknologi informasi belum memadai dalam aspek strategi dan kebijakan teknologi informasi, aspek keamanan, integritas sistem informasi, sumber daya manusia, dan pengendalian terhadap pemrosesan dan file data,
- (3) Peran pengawas internal masih berada di level satu (initial). Hal ini menunjukkan APIP belum mampu untuk memberikan *Assurance* bahwa program atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, APIP belum mampu mencegah korupsi, APIP belum mampu memberikan *assurance* atas efisiensi dan efektifitas program kegiatan pemerintah. Dari permasalahan tersebut walaupun kota Palembang diberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan berarti tidak ada permasalahan yang berkaitan dengan kemampuan aparatur, pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah, dan peran pengawas internal dalam peningkatan akuntabilitas keuangan dengan kualitas laporan keuangan. Hal tersebut menarik untuk dikaji lebih jauh dan adanya perubahan peraturan pemerintah yang harus menerapkan standar akuntansi pemerintah sesuai dengan PP 71 tahun 2010.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Agency Theory

Dalam teori keagenan, Jensen dan Meckling (Jensen, 1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih (*principal*) menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Dipandang dari sudut pandang teori keagenan diatas.

Hubungan antara masyarakat dengan pemerintah adalah seperti hubungan antara prinsipal dan agen. Masyarakat adalah prinsipal dan pemerintah adalah agen. Prinsipal memberikan

wewenang pengaturan kepada agen, dan memberikansumberdaya kepada agen (dalam bentuk pajak dan lain-lain). Sebagai wujud pertanggungjawaban atas wewenang yang diberikan, agen memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap prinsipal. Karena tidak mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh agen (terjadi asimetri informasi) maka prinsipal membutuhkan pihak ketiga yang mampu meyakinkan prinsipal bahwa apa yang dilaporkan oleh agen adalah benar. Dalam posisi sebagai pihak ketiga inilah sebenarnya peran akuntan sektor publik diharapkan berperan besar. Mengingat bahwa sebagian (atau bahkan sebagian besar) laporan yang diberikan pemerintah adalah berbentuk informasi keuangan.

2.2 Decision Usefulness Theory

Teori kegunaan-keputusan informasi akuntansi merupakan bagian dari teori normatif. Teori kegunaan-keputusan (*decision-usefulness theory*) dari informasi akuntansi dikemukakan dalam disertasi Staubus untuk pertama kalinya pada Tahun 1954. Premis dari teori kegunaan-keputusan merupakan tujuan akuntansi untuk menyediakan informasi keuangan mengenai organisasi guna pengambilan keputusan. Sikap manajemen terhadap penerapan suatu standar akuntansi berhubungan dengan kepentingan terhadap pengungkapan informasi akuntansi yang menggambarkan kinerja finansial dalam bentuk laporan keuangan. Teori kegunaan-keputusan informasi akuntansi tercermin dalam bentuk kaidah-kaidah yang harus dipenuhi oleh komponen-komponen pelaporan keuangan agar dapat bermanfaat dalam rangka pengambilan keputusan.

Pengelompokkan *users* dalam konsep *decision-usefulness* terbagi dalam tiga kelompok yaitu kelompok masyarakat, kelompok legislatif, dan kelompok dewan pengawas. Kelompok masyarakat menggunakan laporan keuangan pemerintah untuk mengevaluasi koefisienan dan keefektifan kegiatan yang dilakukan pemerintah, membandingkan hasil program yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya, menaksir operasional keuangan dan kondisi keuangan, dan untuk menentukan terlaksananya anggaran yang dibuat. Kelompok

dewan pengawas menggunakan laporan keuangan pemerintah untuk mengevaluasi pendanaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh eksekutif, membandingkan antara anggaran yang telah dibuat dengan realisasi anggaran yang terjadi, pengawasan aktivitas dana dan posisi keuangan untuk menganalisis keseimbangan dana.

2.3 *Accountability Theory*

Boven (2008) membahas dua konsep utama akuntabilitas sebagai kebajikan dan akuntabilitas sebagai mekanisme. Akuntabilitas sebagai kebajikan digunakan terutama sebagai konsep normatif, sebagai satu set standar untuk evaluasi perilaku sektor publik. Akuntabilitas dipandang sebagai kualitas positif dari organisasi atau pejabat, oleh karena itu, studi akuntabilitas sering berfokus pada isu-isu normatif, pada penilaian perilaku agen publik. Akuntabilitas sebagai mekanisme, digunakan dalam arti lebih sempit, deskriptif. Hal ini dilihat sebagai hubungan kelembagaan atau pengaturan dimana seseorang aktor dapat dimintai pertanggungjawaban oleh forum. Akuntabilitas sebagai mekanisme yang memperlihatkan pengaturan bagaimana kelembagaan beroperasi. Kedua konsep ini sangat berguna untuk studi dan perdebatan tentang pemerintahan yang demokratis.

Di sisi lain Boven (2008) telah menetapkan akuntabilitas dalam pengertian lebih sempit sebagai hubungan antara aktor dan forum, dimana aktor memiliki kewajiban untuk menjelaskan pertanyaan dan aktor mungkin lulus dalam penilaian. Aktor mungkin individu, misalnya seorang pejabat atau pegawai sipil, mungkin juga organisasi seperti lembaga publik dan agen. Hubungan antara forum dan aktor dapat bersifat hubungan *principal-agent* forum menjadi pimpinan tertinggi, misalnya parlemen, yang telah mendelegasikan kewenangan untuk menteri, agen, yang dimintai pertanggungjawaban atas kinerja di kantor.

4.4 **Kemampuan Aparatur**

Aparatur akan berkualitas ketika mereka mempunyai kemampuan untuk melaksanakan

kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kemampuan tersebut hanya dapat dicapai manakala mereka mempunyai bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan. Widodo (2001:308), kemampuan didapat dengan berbagai macam cara antara lain sebagai berikut: (1) Melalui Pendidikan, (2) Melalui Pelatihan, (3) Melalui Pengalaman.

Dari deskripsi teori kemampuan aparatur yang telah diuraikan di atas, diperoleh suatu konsep pemahaman bahwa kemampuan aparatur adalah suatu kondisi dinamis sumber daya manusia yang mencakup aspek Pendidikan, Pelatihan, dan Pengalaman.

2.5 **Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah**

Akuntansi dan sistem informasi akuntansi bertitik tolak dari suatu landasan yang terdiri dari berbagai konsep, yaitu konsep mengenai akuntansi itu sendiri, konsep sistem, konsep informasi, konsep organisasi, dan konsep pengambilan keputusan. (Nunuy, 2009).

Pada sistem akuntansi pemerintahan, ada beberapa ciri terpenting atau persyaratan yang diperlukan, diantaranya sistem akuntansi pemerintahan harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara. Sistem akuntansi pemerintahan harus dapat menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit. Sistem akuntansi pemerintahan harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk penyusunan rencana/program dan evaluasi pelaksanaan secara fisik dan keuangan.

2.6 **Peran Pengawas Internal**

Menurut Yuliani (2010) menyatakan bahwa internal audit adalah suatu aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Dengan demikian internal audit

membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan resiko kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi.

Berdasarkan PP No 60 Tahun 2008 Menteri/ Pimpinan Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota bertanggungjawab atas efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern dilingkungan masing-masing.

2.7 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas dalam arti sempit dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu kepada siapa organisasi bertanggungjawab dan untuk apa organisasi bertanggungjawab. Dalam pengertian luas, akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Mardiasmo (2006), akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-

benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan Masyarakat.

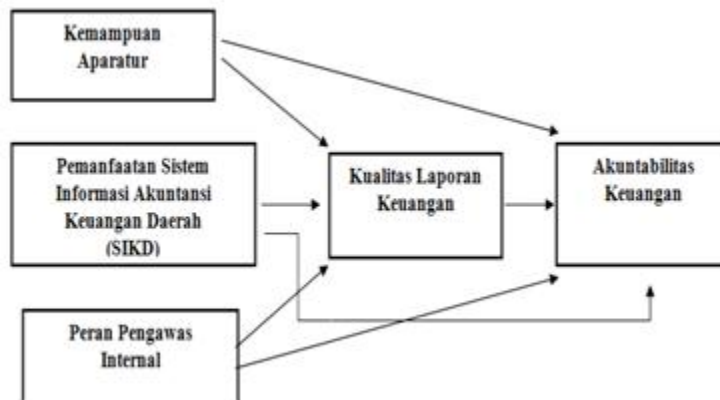
2.8 Kualitas Laporan Keuangan

Berbicara mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah berarti berbicara mengenai karakteristik kualitas laporan keuangan tersebut. Dalam lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi, sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normative yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dihendaki: (1) relevan, (2) handal, (3) dapat dipahami, (3) dapat diperbandingkan.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

2.9 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun seperti dalam bagan berikut ini:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini akan dilakukan analisis kemampuan aparatur, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan peran pengawas

internal terhadap akuntabilitas keuangan terhadap kualitas laporan keuangan sebagai variabel intervening.

2.10 Hipotesis

Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H_1 : Ada pengaruh kemampuan aparatur terhadap kualitas laporan keuangan.
- H_2 : Ada pengaruh antara pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan.
- H_3 : Ada pengaruh antara peran pengawas internal terhadap kualitas laporan keuangan
- H_4 : Ada pengaruh antara kemampuan aparatur terhadap akuntabilitas keuangan
- H_5 : Ada pengaruh antara sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan
- H_6 : Ada pengaruh antara peran pengawas internal terhadap akuntabilitas keuangan.
- H_7 : Ada pengaruh antara kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan.
- H_8 : Ada pengaruh antara kemampuan aparatur terhadap akuntabilitas keuangan melalui kualitas laporan keuangan.
- H_9 : Ada pengaruh antara pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan melalui kualitas laporan keuangan.
- H_{10} : Ada pengaruh antara kemampuan aparatur terhadap akuntabilitas keuangan melalui kualitas laporan keuangan.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian ini adalah Kemampuan Aparatur, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, dan Peran Pengawas Internal Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Variabel Intervening.

3.2 Jenis dan Sumber Data

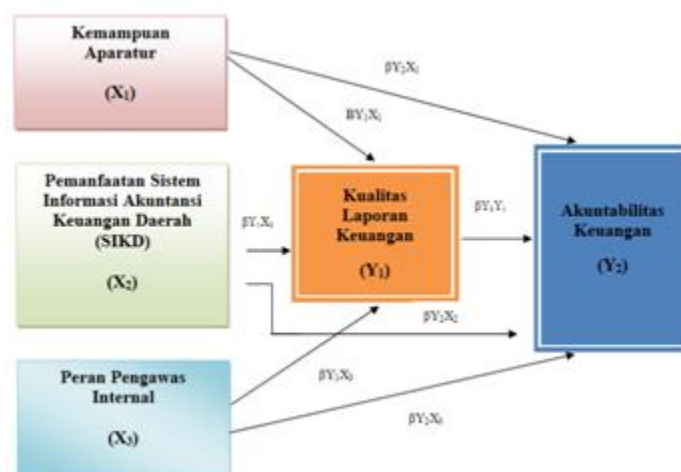
Dalam penelitian ini data yang digunakan oleh penulis berupa data Kuantitatif. Skor jawaban Aparatur SKPD sebagai responden yang diperoleh melalui quesioner.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data dikumpulkan adalah data primer yang langsung diperoleh dari lapangan melalui percobaan, survei, dan observasi. Dalam penelitian ini penulis menyebarkan kuesioner ke Aparatur SKPD Kota Palembang terdiri dari Kepala Subbagian Keuangan dan Bagian Bendahara.

3.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur (*path analysis*). Adapun struktur (jalur) hubungan antar variabel dalam penelitian ini digambarkan:



Gambar 2. Struktur Hubungan Variabel Penelitian

Diagram jalur di atas dapat dituliskan menjadi persamaan struktural yang menggambarkan hubungan sebab akibat antar variabel yang diteliti, yaitu:

$X_2 = \text{SIKD}$.
 $X_3 = \text{Pengawas Internal}$.
 $Y_1 = \text{Kualitas Laporan Keuangan}$.
 $Y_2 = \text{Akuntabilitas Keuangan}$.
 $e = \text{Koefisien korelasi di luar model}$.

Pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung:

$Y_1 = PX_1Y_1 + PX_2Y_1 + PX_3Y_1 + e_1$
 $Y_2 = PX_1Y_2 + PX_2Y_2 + PX_3Y_2 + PY_1Y_2 + e_2$
 Dimana :
 $X_1 = \text{Kemampuan Aparatur}$.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Definisi variabel operasional pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1: Operasionalisasi Variabel Penelitian

No	Variabel Penelitian	Dimensi	Indikator	Skala	Nomor Pertanyaan
1	Kemampuan Aparatur	Pendidikan	• Pengetahuan	Interval	1
			• Pemahaman		2
		Pelatihan Pengalaman	• Khursus/Seminar	Interval	3
			• Lamanya bekerja	Interval	4
			• Macam tugas yang pernah dikerjakan		5
2	Pemanfaatan SIKD	Sumberdaya personalia/ pelaksanaan peralatan dan aturan hukum	• Ketersediaan sumber daya manusia yang cukup untuk melaksanakan sistem informasi akuntansi keuangan daerah.	Interval	6
			• Kelayakan peralatan yang digunakan untuk proses akuntansi		7
			• Adanya peraturan daerah atau keputusan kepala daerah yang mengatur sistem informasi akuntansi keuangan daerah		8
		Tugas	• Terlaksananya pemrosesan data yang akurat. • Terkendalinya data • Terlaksananya penyediaan dan distribusi informasi tepat waktu	Interval	9 10 11

Tabel 1: Operasionalisasi Variabel Penelitian Lanjutan

		Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhnya kebutuhan informasi untuk pengambilan keputusan dalam proses perencanaan dan pengendalian operasi 	Interval	12
3	Pengawas Internal	Melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas & fungsi organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintah daerah • Menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipenuhi dan berjalan sesuai dengan rencana • menentukan baik tidaknya pemeliharaan terhadap kekayaan daerah • menentukan efisiensi dan efektifitas prosedur dan kegiatan pemerintah. 	Interval	13
					14
					15
		Melakukan pembinaan & penyelenggaraan SPIP	<ul style="list-style-type: none"> • penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP • sosialisasi SPIP • peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah. 	Interval	16
					17
					18
					19
4	Akuntabilitas Keuangan	Integritas keuangan Pengungkapan	<ul style="list-style-type: none"> • Kejujuran penyajian • agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai kumpulan gambaran atau 	Interval	20
				Interval	21

Tabel 1: Operasionalisasi Variabel Penelitian Lanjutan

			kenyataan dari kejadian ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintahan untuk suatu periode dan berisi cukup informasi.		
		Ketaatan terhadap peraturan undang-undang.	•peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan akuntansi pemerintahan.	Interval	22

Sumber: Data Diolah Penulis

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Responden

Dalam desain penelitian telah dijelaskan

bahwa responden penelitian ini adalah aparatur SKPD kota Palembang. Oleh karena pejabat SKPD yang mengisi kuesioner hanya terdiri dari dua yakni Bendahara dan Kasubag Keuangan. Tabel 2 berikut ini adalah sebaran sampel berdasarkan jabatan:

Tabel 2: Sebaran Sampel Aparatur SKPD Kota Palembang

No	Instansi/SKPD	Bendahara	Kasubag. Keuangan	Jumlah
1	Dinas Perindag & Koperasi	1	1	2
2	Dinas Inspektorat	1	1	2
3	Dinas Bappeda	1	1	2
4	Dinas Kesehatan	1	1	2
5	Dispenda	1	1	2
6	BKB-PP	1	1	2
7	Dinas Dikpora	1	1	2
8	Dinas Tenaga Kerja	1	1	2
9	Dinas Cakil	1	1	2
10	Dinas BLH	1	1	2
11	Dinas Kesbangpol	1	1	2
12	Dinas Penanaman Modal	1	1	2
13	Dinas Perhubungan	1	1	2
14	Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	1	1	2
15	Dinas Satpol PP	1	1	2
16	Dinas Pariwisata	1	1	2
17	Sekda Bagian Umum	1	0	1
18	Sekda Bagian Pemerintahan	1	0	1

Tabel 2: Sebaran Sampel Aparatur SKPD Kota Palembang Lanjutan

19	Sekda Bagian Keuangan	1	0	1
20	Sekda Bagian Perekonomian	1	0	1
21	Sekda Bagian Humas	1	0	1
22	Sekda Bagian Hukum	1	0	1
23	Sekda Bagian Sosial	1	0	1
24	Sekda Bagian Pembangunan	1	0	1
Jumlah		24	16	40

Sumber: Diolah dari Data Primer, 2016

Berdasarkan tabel 2 di atas sampel aparatur SKPD kota Palembang dengan jabatan sebagai bendahara sebanyak 24 orang (60%) sedangkan 16 orang (40%) sebagai Kasubag Keuangan. Kemudian lama bekerja 6 tahun sebanyak 23 orang (57,5%), lama bekerja 7 tahun sebanyak 16 orang (40%) dan 1 orang (2.5%) dengan lama bekerja 8 tahun.

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas

Dua prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini mengukur kekonsistenan dan keakurasian data yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen, yaitu (1) uji konsistensi internal dengan uji statistik Cronbach's Alpha, (2) uji korelasional antara skor masing-masing butir dengan skor total (Imam Ghazali, 2001). Hasil pengujian reliabilitas tersaji pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3: Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner

Variabel	Cronbach Alpha
Kemampuan Aparatur (X1)	0,946
Pemanfaatan SIKD (X2)	0,983
Peran Pengawas Internal (X3)	0,986
Kualitas Laporan Keuangan (Y1)	0,982
Akuntabilitas Keuangan (Y2)	0,968

Sumber: Data Primer Diolah, 2016

4.3 Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalisasi

- (1) uji normalisasi terhadap variabel akuntabilitas keuangan (Y2) menunjukkan nilai signifikan atau probabilitas $0,650 > 0,05$ artinya data residual berdistribusi normal,
- (2) uji normalisasi terhadap variabel kualitas

laporan keuangan (Y1) menunjukkan nilai signifikan atau probabilitas $0,553 > 0,05$ artinya data residual berdistribusi normal,

- (3) uji normalisasi terhadap variabel kemampuan aparatur (X1) menunjukkan nilai signifikan atau probabilitas $0,954 > 0,05$ artinya data residual berdistribusi normal,
- (4) uji normalisasi terhadap variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X2) menunjukkan nilai signifikan atau probabilitas $0,849 > 0,05$ artinya data residual berdistribusi normal, dan
- (5) uji normalisasi terhadap variabel peran pengawas internal (X3) menunjukkan nilai signifikan atau probabilitas $0,340 > 0,05$ data residual berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

- (1) menyajikan data hasil uji multikolinearitas terhadap variabel kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa kemampuan aparatur nilai *tolerance* $0,660 >$ nilai *tolerance* hitung $0,10$ dan nilai VIF $1,516 <$ nilai VIF hitung $10,00$, maka tidak terjadi multikoliniearitas antar variabel independen, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah nilai *tolerance* $0,445 >$ nilai *tolerance* hitung $0,10$ dan nilai VIF $2,197 <$ nilai VIF hitung $10,00$, maka tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen, peran pengawas internal nilai *tolerance* $0,593 >$ nilai *tolerance* hitung $0,10$ dan nilai VIF $1,685 <$ nilai VIF hitung $10,00$, maka tidak terjadi multikoliniearitas antar variabel independen, dan

- (2) menyajikan multikolinearitas terhadap variabel akuntabilitas keuangan menunjukkan bahwa kemampuan aparatur nilai *tolerance* > 0,660 nilai *tolerance* hitung 0,10 dan nilai VIF 1,516 < nilai VIF hitung 10,00 maka tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah nilai *tolerance* 0,455 > nilai *tolerance* hitung 0,10 dan nilai VIF 2,197 < nilai VIF hitung 10,00 maka tidak terjadi multikoliniearitas antar variabel independen, peran pengawas internal nilai *tolerance* 0,593 > nilai *tolerance* hitung 0,10 dan nilai VIF 1,685 < nilai VIF hitung 10,00 maka tidak terjadi multikoliniearitas antar variabel independen.

4.4 Pengujian Hipotesis

1. Analisis Substruktur 1

$$Y_1 = a + PX_1 + PX_2 + PX_3 + e_1$$

4.5 Pengujian Simultan (Uji F)

Besarnya angka R square (R^2) pada kemampuan aparatur, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan peran pengawas internal terhadap kualitas laporan keuangan secara simultan adalah 0,860 atau 86% untuk mengetahui kelayakan model regresi digambarkan angka-angka dari tabel ANOVA. Jika F-hitung > F-tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima dan sebaliknya F-hitung < F-tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dari hasil perhitungan, diperoleh angka F-hitung sebesar 80,741 > F-tabel sebesar 2,64 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian model regresi tersebut sudah layak dan benar.

Kesimpulannya adalah kemampuan aparatur, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan peran pengawas internal secara simultan mempengaruhi kualitas laporan keuangan sebesar 86% dan tingkat signifikan $0,000a < \alpha = 0,05$. Besar pengaruh variabel lain di luar model regresi tersebut dihitung dengan rumus: $(1-r^2)$ atau $(1-0,860)$ yaitu 0,14% atau 14%.

4.6 Pengujian Parsial (Uji t)

Tabel 4: Pengaruh Kemampuan Aparatur, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Pengawas Internal Secara Parsial Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Model	t	Sig	Keterangan
kem aprt x_1	1,548	0,130	H1 Ditolak
pemftn_SIKD x_2	5,838	0,000	H2 Diterima
Prn_pngws_intrnl x_3	0,334	0,740	H3 Ditolak

Sumber: Diolah Melalui SPSS

a. Pengaruh Kemampuan Aparatur terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Jika t-hitung > t-tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima dan sebaliknya t-hitung < t-tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil perhitungan SPSS diperoleh angka t-hitung sebesar 1,548. Besarnya angka t-tabel dengan ketentuan $\alpha = 0,05$ dan $dk = (n-2)$ atau $(40-2) = 38$. Dari ketentuan tersebut diperoleh angka t-tabel sebesar 1,685. Berdasarkan hasil perhitungan tabel signifikan diperoleh angka sebesar 0,130 > $\alpha = 0,05$ sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak artinya tidak terdapat pengaruh variabel kemampuan aparatur terhadap kualitas laporan keuangan. Tidak adanya pengaruh kemampuan aparatur terhadap kualitas laporan keuangan dilihat dari besarnya nilai signifikan penelitian terhadap tingkat signifikan $0,130 > \alpha = 0,05$.

b. Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Jika t-hitung > t-tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima dan sebaliknya t-hitung < t-tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil perhitungan SPSS diperoleh angka t-hitung sebesar 5,838. Besarnya angka t-tabel dengan ketentuan $\alpha = 0,05$ dan $dk = (n-2)$ atau $(40-2) = 38$. Dari ketentuan tersebut diperoleh angka t-tabel sebesar 1,685. Berdasarkan hasil perhitungan tabel signifikan diperoleh angka sebesar 0,000 < $\alpha = 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima artinya terdapat pengaruh variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah

terhadap kualitas laporan keuangan. Adanya pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan dilihat dari kecilnya nilai signifikan penelitian terhadap tingkat signifikan $0,000 < \alpha = 0,05$.

c. Pengaruh Peran Pengawas Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Jika t-hitung > t-tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima dan sebaliknya t-hitung < t-tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil perhitungan SPSS diperoleh angka t-hitung sebesar 0,334. Besarnya angka t-tabel dengan ketentuan $\alpha = 0,05$ dan $dk = (n-2)$ atau $(40-2) = 38$. Dari ketentuan tersebut diperoleh angka t-tabel sebesar 0,740. Berdasarkan hasil perhitungan tabel signifikan diperoleh angka sebesar $0,740 > \alpha = 0,05$ sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak artinya tidak terdapat pengaruh variabel peran pengawas internal terhadap kualitas laporan keuangan. Tidak adanya pengaruh peran pengawas internal terhadap kualitas laporan keuangan dilihat dari besarnya nilai signifikan penelitian terhadap tingkat signifikan $0,740 > \alpha = 0,05$.

2. Analisis Substruktur 2

$$Y_2 = a + PX_1 + PX_2 + PX_3 + PY_1Y_2 + e_2$$

4.6 Pengujian Simultan (Uji F)

Besarnya angka R-square (r^2) adalah 0,953 dimana angka tersebut mempunyai arti bahwa pengaruh kemampuan aparatur, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan peran pengawas internal terhadap akuntabilitas keuangan secara simultan adalah 95,3%. Untuk mengetahui kelayakan model regresi digambarkan angka-angka dari tabel ANOVA. Jika F-hitung > F-tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima dan sebaliknya F-hitung < F-tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dari hasil perhitungan, diperoleh angka F-hitung sebesar $265,066 > F$ -tabel sebesar 2,64 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian model regresi tersebut sudah layak dan benar. Kesimpulannya

adalah kemampuan aparatur, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan peran pengawas internal secara simultan mempengaruhi akuntabilitas keuangan sebesar 95,3% dan tingkat signifikan $0,000a < \alpha = 0,05$. Besar pengaruh variabel lain di luar model regresi tersebut dihitung dengan rumus: $(1-r^2)$ atau $(1-0,953)$ yaitu 0,047 atau 4,7%. Pengujian kualitas laporan keuangan sebagai mediasi terhadap akuntabilitas keuangan. Besarnya angka R-square (r^2) adalah 0,878 dimana angka tersebut mempunyai arti bahwa kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan adalah 87,8%. Untuk mengetahui kelayakan model regresi digambarkan angka-angka dari tabel ANOVA. Jika F-hitung > F-tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima dan sebaliknya F-hitung < F-tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dari hasil perhitungan, diperoleh angka F-hitung sebesar $281,469 > F$ -tabel sebesar 2,64 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian model regresi tersebut sudah layak dan benar. Kesimpulannya adalah kualitas laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas keuangan sebesar 87,8% dan tingkat signifikan $0,000a < \alpha = 0,05$. Besar pengaruh variabel lain di luar model regresi tersebut dihitung dengan rumus: $(1-r^2)$ atau $(1-0,878)$ yaitu 0,112 atau 12,2%.

4.7 Uji Parsial (Uji t)

Tabel 5: Pengaruh Kemampuan Aparatur, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Peran Pengawas Internal, dan Kualitas Laporan Keuangan Secara Parsial Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Model	t	Sig	Keterangan
kem_aprt_x ₁	2,165	0,037	H4 Diterima
pemftn_SIKD_x ₂	7,152	0,000	H5 Diterima
Prn_pngws_intrnl_x ₃	4,002	0,000	H6 Diterima
Kua_lk_y ₁	16,777	0,000	H7 Diterima

Sumber: Diolah Melalui SPSS

a. Pengaruh Kemampuan Aparatur terhadap Akuntabilitas Keuangan

Jika t-hitung > t-tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima dan sebaliknya t-hitung < t-tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil perhitungan SPSS diperoleh angka t-hitung sebesar 2,165.

Besarnya angka t-tabel dengan ketentuan $\alpha = 0,05$ dan $dk = (n-2)$ atau $(40-2) = 38$. Dari ketentuan tersebut diperoleh angka t-tabel sebesar 1,685. Berdasarkan hasil perhitungan tabel signifikan diperoleh angka sebesar $0,037 < \alpha = 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima artinya terdapat pengaruh variabel kemampuan aparatur terhadap akuntabilitas keuangan. Adanya pengaruh kemampuan aparatur terhadap akuntabilitas keuangan dilihat dari besarnya nilai signifikan penelitian terhadap tingkat signifikan $0,037 < \alpha = 0,05$.

b. Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Keuangan

Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima dan sebaliknya $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil perhitungan SPSS diperoleh angka t-hitung sebesar 7,152. Besarnya angka t-tabel dengan ketentuan $\alpha = 0,05$ dan $dk = (n-2)$ atau $(40-2) = 38$. Dari ketentuan tersebut diperoleh angka t-tabel sebesar 1,685. Berdasarkan hasil perhitungan tabel signifikan diperoleh angka sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima artinya terdapat pengaruh variabel sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan. Berpengaruhnya sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan dilihat dari besarnya nilai signifikan penelitian terhadap tingkat signifikan $0,000 < \alpha = 0,05$.

c. Pengaruh Peran Pengawas Internal terhadap Akuntabilitas Keuangan

Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima dan sebaliknya $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil perhitungan SPSS diperoleh angka t-hitung sebesar 4,002. Besarnya angka t-tabel dengan ketentuan $\alpha = 0,05$ dan $dk = (n-2)$ atau $(40-2) = 38$. Dari ketentuan tersebut diperoleh angka t-tabel sebesar 1,685. Berdasarkan hasil perhitungan tabel signifikan diperoleh angka sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima artinya terdapat pengaruh variabel peran

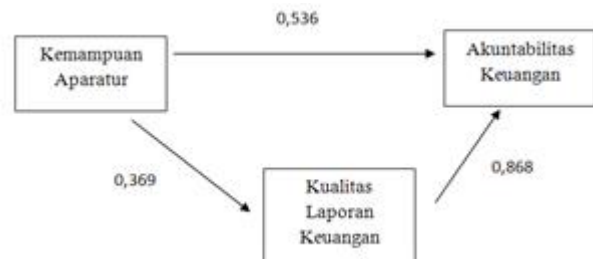
pengawas internal terhadap akuntabilitas keuangan. Adanya pengaruh peran pengawas internal terhadap akuntabilitas keuangan dilihat dari kecilnya nilai signifikan penelitian terhadap tingkat signifikan $0,000 < \alpha = 0,05$.

d. Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Keuangan

Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima dan sebaliknya $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil perhitungan SPSS diperoleh angka t-hitung sebesar 16,777. Besarnya angka t-tabel dengan ketentuan $\alpha = 0,05$ dan $dk = (n-2)$ atau $(40-2) = 38$. Dari ketentuan tersebut diperoleh angka t-tabel sebesar 1,685. Berdasarkan hasil perhitungan tabel signifikan diperoleh angka sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima artinya terdapat pengaruh variabel kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan. Adanya pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan dilihat dari kecilnya nilai signifikan penelitian terhadap tingkat signifikan $0,000 < \alpha = 0,05$.

4.8 Pengujian Variabel Intervening

Strategi *Causal Step*



Gambar 3. Hubungan Pengaruh Kemampuan Aparatur Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Variabel Intervening Menggunakan Strategi Causal

Tiga persamaan regresi yang harus diestimasi dalam strategi causal step dalam pengujian variabel intervening adalah sebagai berikut:

- a. Persamaan regresi variabel intervening Kualitas Laporan Keuangan (Y1) pada variabel independen Kemampuan Aparatur (X1)

Tabel 6: Strategi Causal Step Pengaruh Kemampuan Aparatur Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Model	Unstandardized Coefficients B	Sig.
1 (Constant)	-10,445	0,249
Kem_aprt_x ₁	0,369	0,130

Sumber: Diolah dari SPSS

Hasil analisis ditemukan bukti bahwa kemampuan aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai signifikan $0,130 > \alpha = 0,05$ dan koefisien regresi = 0,369.

- b. Persamaan regresi variabel independen Akuntabilitas Keuangan (Y_2) terhadap variabel independen Kemampuan Aparatur (X_1)

Tabel 7: Strategi Causal Step Pengaruh Kemampuan Aparatur Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Model	Unstandardized Coefficients B	Sig.
1 (Constant)	-31,684	0,000
kem_aprt_x ₁	0,322	0,037

Sumber: Diolah dari SPSS

Hasil analisis ditemukan bahwa kemampuan aparatur signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan dengan nilai signifikan $0,037 < \alpha = 0,05$ dan koefisien regresi = 0,322.

- c. Persamaan regresi berganda variabel dependen Akuntabilitas Keuangan (Y_2) pada variabel independen Kemampuan Aparatur (X_1) dengan Kualitas Laporan Keuangan sebagai intervening (Y_1)

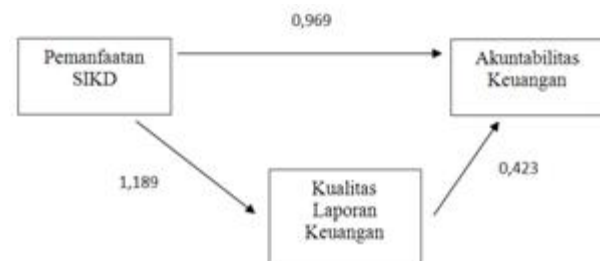
Hasil analisis ditemukan bahwa kemampuan aparatur signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan, setelah dimediasi oleh kualitas laporan keuangan dengan nilai signifikan $0,012 < \alpha = 0,05$ dan koefisien regresi = 0,536. Selanjutnya ditemukan bahwa kualitas laporan keuangan signifikan terhadap

akuntabilitas keuangan, setelah memediasi oleh kemampuan aparatur dengan nilai signifikan $0,000 < \alpha = 0,05$ dan koefisien regresi = 0,868. Selanjutnya maka dapat disimpulkan bahwa model ini termasuk ke dalam *part mediation* dimana variabel kemampuan aparatur dapat mempengaruhi akuntabilitas keuangan secara langsung dan bisa melalui kualitas laporan keuangan sebagai mediasi.

Tabel 8: Strategi Causal Step Pengaruh Kemampuan Aparatur Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Intervening

Model	Unstandardized Coefficients B	Sig.
kem_aprt_x ₁	0,536	0,012
kua_lk_y ₁	0,868	0,000

Sumber: Diolah dari SPSS



Gambar 4. Hubungan Pengaruh Pemanfaatan SIKD Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Variabel Intervening Menggunakan Strategi Causal

- a. Persamaan regresi variabel intervening Kualitas Laporan Keuangan (Y_1) pada variabel independen Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (X_2)

Hasil analisis ditemukan bukti bahwa pemanfaatan SIKD berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai signifikan $0,000 < \alpha = 0,05$ dan koefisien regresi = 1,189.

Tabel 9: Strategi Causal Step Pengaruh Pemanfaatan SIKD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Model	Unstandardized Coefficients B	Sig.
1 (Constant)	-10,445	0,249
Pemftn_SIKD_x ₂	1,189	0,000

Sumber: Diolah dari SPSS

- b. Persamaan regresi variabel independen Akuntabilitas Keuangan (Y₂) terhadap variabel dependen Pemanfaatan SIKD (X₂)

Tabel 10: Strategi Causal Step Pengaruh Pemanfaatan SIKD Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Model	Unstandardized Coefficients B	Sig.
1 (Constant)	-31,684	0,000
Pemftn_SIKD_x ₂	0,911	0,000

Sumber: Diolah dari SPSS

- c. Persamaan regresi berganda variabel dependen Akuntabilitas Keuangan (Y₂) pada variabel independen Pemanfaatan SIKD (X₂) dengan Kualitas Laporan Keuangan sebagai intervening (Y₁)

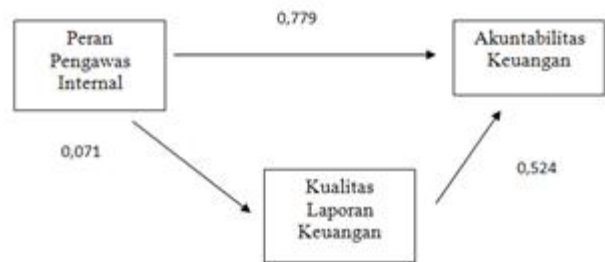
Tabel 11: Strategi Causal Step Pengaruh Pemanfaatan SIKD Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Intervening

Model	Unstandardized Coefficients B	Sig.
Pemftn_SIKD_x ₂	0,969	0,000
kua_lk_y ₁	0,423	0,001

Sumber: Diolah dari SPSS

Hasil analisis ditemukan bahwa pemanfaatan SIKD signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan, setelah dimediasi oleh kualitas laporan keuangan dengan nilai signifikan $0,000 < \alpha = 0,05$

dan koefisien regresi = 0,969. Selanjutnya ditemukan bahwa kualitas laporan keuangan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan, setelah dimediasi oleh pemanfaatan SIKD dengan nilai signifikan $0,001 < \alpha = 0,05$ dan koefisien regresi = 0,423. Selanjutnya maka dapat disimpulkan bahwa model ini termasuk ke dalam *part mediation* dimana variabel pemanfaatan SIKD dapat mempengaruhi akuntabilitas keuangan secara langsung dan bisa melalui kualitas laporan keuangan sebagai mediasi.



Gambar 5. Hubungan Pengaruh Peran Pengawas Internal Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Variabel Intervening Menggunakan Strategi Causal

- a. Persamaan regresi variabel intervening Kualitas Laporan Keuangan (Y₁) pada variabel independen Peran Pengawas Internal (X₃)

Tabel 12. Strategi Causal Step Pengaruh Peran Pengawas Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Model	Unstandardized Coefficients B	Sig.
1 (Constant)	-31,684	0,000
Pemftn_SIKD_x ₂	0,911	0,000

Sumber: Diolah dari SPSS

Hasil analisis ditemukan bukti bahwa peran pengawas internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai signifikan $0,740 > \alpha = 0,05$ dan koefisien regresi = 0,071.

- b. Persamaan regresi variabel independen Akuntabilitas Keuangan (Y₂) terhadap variabel dependen Peran Pengawas Internal (X₃)

Tabel 13: Strategi Causal Step Pengaruh Peran Pengawas Internal Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Model	Unstandardized Coefficients B	Sig.
1 (Constant)	-31,684	0,000
Prn pgwsintrl x ₃	0,531	0,000

Sumber: Diolah dari SPSS

Hasil analisis ditemukan bahwa peran pengawas internal signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan dengan nilai signifikan 0,000 < $\alpha = 0,05$ dan koefisien regresi = 0,531.

- Persamaan regresi berganda variabel dependen Akuntabilitas Keuangan (Y_2) pada variabel independen Peran Pengawas Internal (X_3) dengan Kualitas Laporan Keuangan sebagai intervening (Y_1)

Tabel 14: Strategi Causal Step Pengaruh Peran Pengawas Internal Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Intervening

Model	Unstandardized Coefficients B	Sig.
Prn pgwsintrl x ₃	0,779	0,000
kua_lk_y ₁	0,524	0,000

Sumber: Diolah dari SPSS

Hasil analisis ditemukan bahwa Peran Pengawas Internal signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan, setelah dimediasi oleh kualitas laporan keuangan dengan nilai signifikan 0,000 < $\alpha = 0,05$ dan koefisien regresi = 0,779. Selanjutnya ditemukan bahwa kualitas laporan keuangan signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan, setelah dimediasi oleh Pemanfaatan SIKD dengan nilai signifikan 0,000 < $\alpha = 0,05$ dan koefisien regresi = 0,524. Selanjutnya maka dapat disimpulkan bahwa model ini termasuk ke dalam *part mediation* dimana variabel Peran Pengawas Internal dapat mempengaruhi akuntabilitas keuangan secara

langsung dan bisa melalui kualitas laporan keuangan sebagai mediasi.

4.9 Perhitungan Pengaruh

Tabel 15: Pengaruh Langsung (*Direct Effect*)

Variabel	Hasil
Pengaruh Kemampuan Aparatur Terhadap Kualitas Laporan Keuangan $X_1 \rightarrow Y_1$	0,369
Pengaruh Pemanfaatan SIKD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan $X_2 \rightarrow Y_1$	1,189
Pengaruh Peran Pengawas Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan $X_3 \rightarrow Y_1$	0,071
Pengaruh Kemampuan Aparatur Terhadap Akuntabilitas Keuangan $X_1 \rightarrow Y_2$	2,165
Pengaruh Pemanfaatan SIKD Terhadap Akuntabilitas Keuangan $X_2 \rightarrow Y_2$	7,152
Pengaruh Peran Pengawas Internal Terhadap Akuntabilitas Keuangan $X_3 \rightarrow Y_2$	4,002
Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan $Y_1 \rightarrow Y_2$	16,777

Tabel 16: Pengaruh Tidak Langsung (*Indirect Effect*)

Variabel	Perhitungan	Hasil
Pengaruh Kemampuan Aparatur terhadap Akuntabilitas Keuangan melalui Kualitas Laporan Keuangan $X_1 \rightarrow Y_1 \rightarrow Y_2$	0,369 x 0,868	0,320
Pengaruh Pemanfaatan SIKD terhadap Akuntabilitas Keuangan melalui Kualitas Laporan Keuangan $X_2 \rightarrow Y_1 \rightarrow Y_2$	1,189 x 0,423	0,502
Pengaruh Peran Pengawas Internal terhadap Akuntabilitas Keuangan melalui Kualitas Laporan Keuangan $X_3 \rightarrow Y_1 \rightarrow Y_2$	0,071 x 0,524	0,037

Tabel 17: Pengaruh Total (*Total Effect*)

Variabel	Perhitungan	Hasil
Pengaruh Kemampuan Aparatur terhadap Akuntabilitas Keuangan melalui Kualitas Laporan Keuangan $X_1 \rightarrow Y_1 \rightarrow Y_2$	0,320 + 0,536	0,856
Pengaruh Pemanfaatan SIKD terhadap Akuntabilitas Keuangan melalui Kualitas Laporan Keuangan $X_2 \rightarrow Y_1 \rightarrow Y_2$	0,502 + 0,969	1,471
Pengaruh Pemanfaatan SIKD terhadap Akuntabilitas Keuangan melalui Kualitas Laporan Keuangan $X_3 \rightarrow Y_1 \rightarrow Y_2$	0,037 + 0,779	0,816

4.10 Pembahasan

Berikut disajikan pembahasan pengaruh kemampuan aparatur, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan peran pengawas internal terhadap akuntabilitas keuangan dengan kualitas laporan keuangan sebagai variabel intervening.

a. Analisis Pengaruh Kemampuan Aparatur terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil analisis secara parsial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota Palembang menunjukkan bahwa variabel kemampuan aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan dibuktikan dengan nilai signifikan $> 0,05$ Hal ini tidak sejalan dengan hipotesis yaitu kemampuan aparatur tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian ini dilandasi oleh Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK, 2014-2015) atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumsel menyatakan bahwa kesiapan Pemerintah Provinsi Sumsel dalam rangka penerapan sistem akuntansi berbasis akrual belum memadai yang dimana belum tersedianya sumber daya manusia yang kompeten setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) terutama dalam hal pengelolaan keuangan berdasarkan data yang diperoleh dari badan kepegawaian daerah provinsi Sumsel yang memiliki latar belakang sarjana ekonomi sebanyak 504 orang, yang terdiri dari 126 orang sarjana akuntansi dan sebanyak 378 orang sarjana ekonomi non akuntansi. Oleh karena itu merupakan faktor tidak berpengaruhnya kemampuan aparatur terhadap kualitas laporan keuangan.

b. Analisis Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil analisis secara parsial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota Palembang menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai signifikan $< 0,05$. Hal ini sejalan dengan hipotesis yaitu pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini sesuai dengan hipotesis serta teori kegunaan-keputusan (*Decision Usefulness Theory*) yang mencakup mengenai syarat dari kualitas informasi akuntansi yang berguna dalam keputusan yang akan diambil oleh pengguna. Hasil penelitian ini juga didukung temuan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yuliani Safrida (2010), SIKD berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan.

c. Analisis Pengaruh Peran Pengawas Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil analisis secara parsial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota Palembang menunjukkan bahwa peran pengawas internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai signifikan $> 0,05$. Hal ini tidak sejalan dengan hipotesis.

Hasil penelitian ini dilandasi oleh Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP

BPK, 2014-2015) menyatakan bahwa Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) belum mampu untuk memberikan *assurance* bahwa program atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah telah sesuai dengan peraturan undang-undang,

Aparatur pengawas internal pemerintah belum mampu mencegah korupsi, aparatur pengawas internal pemerintah belum mampu memberikan *assurance* atas efisiensi dan efektifitas program kegiatan pemerintah di dalam pelaksanaan sistem laporan keuangan pemerintah, dan jumlah instansi pemerintah yang dinilai akuntabel baru mencapai 24%. Oleh karena itu merupakan faktor tidak berpengaruhnya peran pengawas internal terhadap kualitas laporan keuangan.

d. Analisis Pengaruh Kemampuan Aparatur Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan hasil analisis secara persial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota Palembang menunjukkan bahwa kemampuan aparatur berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan dengan nilai signifikan $< 0,05$. Hal ini sejalan dengan hipotesis bahwa kemampuan aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Dengan demikian, hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis dan sangat berkaitan dengan teori akuntabilitas menyatakan bahwa akuntabilitas sebagai mekanisme yang harus diterapkan oleh aparatur pemerintahan sehingga dibutuhkan keahlian untuk menerapkan mekanisme tersebut di dalam peningkatan akuntabilitas keuangan.

e. Analisis Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan hasil analisis secara persial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota Palembang menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan dengan nilai signifikan $< 0,05$. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis dan berkaitan dengan teori keagenan bahwa prinsipal memberikan kepercayaan kepada agen untuk

mengelola sumberdaya dalam bentuk pajak dan lain-lain. Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, penggunaan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi untuk membantu pengelolaan data yang lebih cepat, efektif, dan efisien.

f. Analisis Pengaruh Peran Pengawas Internal Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan hasil analisis secara persial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota Palembang menunjukkan bahwa peran pengawas internal berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan dengan nilai signifikan $< 0,05$. Hal ini sejalan dengan hipotesis bahwa peran pengawas internal berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Hasil penelitian sesuai dengan hipotesis dan berkaitan dengan teori akuntabilitas yang menyatakan bahwa akuntabilitas sebagai mekanisme yang harus diterapkan oleh aparatur pemerintahan untuk pertanggung jawaban keuangan.

Dalam menunjang mekanisme tersebut selain kemampuan aparatur itu sendiri juga dibutuhkan peran pengawas internal karena peran pengawas internal tugasnya memonitoring seluruh aktifitas aparatur pemerintah yang akan memberikan masukan dan saran di dalam pemenuhan sistem akuntabilitas keuangan yang sesuai dengan mekanisme regulasi yang di tetapkan.

g. Analisis Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan hasil analisis secara persial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota Palembang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan dengan nilai signifikan $< 0,05$. Hal ini sejalan dengan hipotesis bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Dengan demikian, hasil penelitian sesuai dengan hipotesis dan dengan pola pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan Negara dikembangkan sejalan dengan teori keagenan.

- h. Analisis Pengaruh Kemampuan Aparatur Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Variabel Intervening

Berdasarkan hasil analisis jalur secara parsial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota Palembang menunjukkan bahwa variabel kualitas laporan keuangan memediasi kemampuan aparatur terhadap akuntabilitas keuangan dengan signifikan positif, oleh karena itu dikatakan sebagai *part mediation*, karena kemampuan aparatur dapat mempengaruhi secara langsung akuntabilitas keuangan tanpa harus menggunakan mediasi dengan nilai signifikannya 0,000.

Setelah dimediasi kualitas laporan keuangan secara tidak langsung dapat memediasi kemampuan aparatur dengan nilai signifikannya 0,012. Hasil penelitian mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan memediasi kemampuan aparatur terhadap akuntabilitas keuangan. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini mempunyai arah yang sama dari hipotesis yaitu berpengaruh signifikan.

Berdasarkan analisis variabel kemampuan aparatur terhadap akuntabilitas keuangan pada satuan kerja perangkat daerah kota Palembang menunjukkan terdapat pengaruh. Artinya kemampuan aparatur sangat di butuhkan di dalam peningkatan akuntabilitas keuangan karena berkaitan dengan teori akuntabilitas menyatakan bahwa akuntabilitas sebagai mekanisme yang harus di terapkan oleh aparatur pemerintah, untuk menerapkan mekanisme tersebut di butuhkan kemampuan untuk memutuskan kebijakan-kebijakan yang ada sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya setelah di mediasi oleh kualitas laporan keuangan menunjukkan nilai signifikannya menurun menjadi 0,012 dari 0,000 artinya variabel kemampuan aparatur sangat di butuhkan dalam menciptakan kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas keuangan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

- i. Analisis Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Variabel Intervening

Berdasarkan hasil analisis jalur secara parsial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota Palembang menunjukkan bahwa variabel kualitas laporan keuangan memediasi pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan dengan signifikan positif, oleh karena itu dikatakan sebagai *part mediation*, karena pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dapat mempengaruhi secara langsung akuntabilitas keuangan tanpa harus menggunakan mediasi dengan nilai signifikannya 0,000.

Setelah dimediasi kualitas laporan keuangan secara tidak langsung dapat memediasi kemampuan aparatur dengan nilai signifikannya 0,001. Hasil penelitian mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan memediasi pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan. Dengan demikian, hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis dan berkaitan dengan teori keagenan.

- j. Analisis Pengaruh Peran Pengawas Internal terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Variabel Intervening

Berdasarkan hasil analisis jalur secara parsial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota Palembang menunjukkan bahwa variabel kualitas laporan keuangan memediasi peran pengawas internal terhadap akuntabilitas keuangan dengan signifikan positif, oleh karena itu dikatakan sebagai *part mediation*, karena peran pengawas internal dapat mempengaruhi secara langsung akuntabilitas keuangan tanpa harus menggunakan mediasi dengan nilai signifikannya 0,000.

Setelah dimediasi kualitas laporan keuangan secara tidak langsung dapat memediasi peran pengawas internal dengan nilai signifikannya 0,000. Hasil penelitian mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan

memediasi peran pengawas internal terhadap akuntabilitas keuangan. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini mempunyai arah yang sama dari hipotesis yaitu berpengaruh signifikan. Dengan demikian, hasil penelitian sesuai dengan hipotesis dan berkaitan dengan teori keagenan.

Maka dapat disimpulkan bahwa, variabel peran pengawas internal mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan dan menambahkan kualitas laporan keuangan sebagai mediasi.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pada variabel bebas antara kemampuan aparatur, pemanfaatan SIKD, dan peran pengawas internal terbukti bahwa secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat kualitas laporan keuangan secara signifikan positif. Secara parsial antara kemampuan aparatur terhadap kualitas laporan keuangan dan peran pengawas internal terhadap kualitas laporan keuangan hasilnya tidak ada pengaruh. Selanjutnya pada variabel bebas antara kemampuan aparatur, pemanfaatan SIKD, dan peran pengawas internal terbukti bahwa secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat akuntabilitas keuangan secara signifikan positif. Secara parsial seluruh variabel independen memiliki pengaruh signifikan positif terhadap variabel dependen.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi praktisi, Berdasarkan observasi di lapangan di dapat bahwa tingkat akademisi yang ada masih dirasa kurang dari 40 sampel yang ada masih banyak yang memiliki jenjang S1 dan tugas yang

diberikan tidak sesuai dengan bidang akademis masing-masing aparatur pemerintahan. Kedepan diharapkan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam pengelolaan keuangan agar diberikan pelatihan yang memadai supaya proses pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sesuai yang diharapkan dan mampu melaksanakan pertanggungjawaban dengan baik.

Dalam hal aksesibilitas laporan keuangan sebaiknya melakukan pengkajian ulang mengenai sistem informasi akuntansi keuangan daerah untuk lebih mempertanggungjawabkan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah sebagai informasi penting yang berhak diperoleh publik. Serta pengawas internal lebih memberikan *assurance* terhadap aparatur pemerintah di dalam pengelolaan pemerintahan yang lebih baik.

2. Bagi akademisi, untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang diduga memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan serta variabel mediasi yang berbeda. Penambahan objek SKPD juga dirasa perlu, tidak hanya dari satu wilayah SKPD saja, namun lebih baik jenis maupun wilayahnya sehingga jumlah responden penelitian dapat lebih banyak dan dapat dibandingkan antar daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bovens, Mark. 2008, *Two Concepts of Accountability. European Law Journal, Vol 13*. No 4, PP. 447-468, Akses 8 Januari 2015, pada <http://www.researchgate.net>.
- [2] Ghazali, Imam, 2011, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- [3] Jensen, M. C and Meckling, W.H. 1976, *Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, Journal of Financial Economics, Vol. 3, No.*

- 4, *PP*. 305-360, Akses 2 Oktober 2015, pada <http://scholar.google.co.id>.
- [4] Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 2015, Melalui www.BPK.go.id.
- [5] Mardiasmo. 2006, *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*, Jurnal Akuntansi Pemerintahan, Vol 2. No 1. PP 1-17, Akses 28 Oktober 2015, pada <https://id.scribd.com>.
- [6] Nunuy. 2009, *Pengaruh Kompetensi Anggota DPR dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi*, Jurnal Risert dan Akuntansi, Vol 12, No 1, PP 44-56, Akses 10 Oktober 2016, pada <http://scholar.google.co.id>.
- [7] Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Tentang Pertanggungjawaban Pimpinan Lembaga Atas Efektifitas Penyelenggaraan Sistem SPIP.
- [8] Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, Tentang Pedoman Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- [9] Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- [10] Roviyantie, Devi. 2011, *Pengaruh Kompetensi Sumberdaya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*, Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Vol 13, No 2 PP 68-75, Akses 15 November 2015, pada <https://www.google.co.id>.
- [11] Suwardjono. 2005, *Teori Akuntansi: Pengungkapan Pelaporan Keuangan*, BPF, Yogyakarta.
- [12] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008, Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah yang Lebih Luas.
- [13] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah.
- [14] Permendagri Nomor 21 Tahun 2012, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- [15] Widodo, Joko. 2001, *Good Governanance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya.
- [16] Yuliani, Syafrida. 2010, *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Peran Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Banda Aceh)*, Jurnal Telaah dan Risert Akuntansi, Vol 3, No 2, PP 206-220, Akses 2 Januari 2016, pada <http://scholar.google.co.id>.